

KEMISKINAN DAN TINGGINYA KONSUMSI ROKOK: FAKTOR PENYEBAB SULITNYA IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMIC* DI PULAU JAWA

Oleh:

Muhammad Firdaus¹ and Tri Suryaningsih

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terpenting dalam perekonomian Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, yang secara formal lebih dari 14 persen penduduk pada tahun 2009 mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan belum berhasil sepenuhnya, karena salah satu tujuan dari pembangunan adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan pembangunan yang tidak mengubah kondisi kemiskinan akan menyisakan masalah yang memicu permasalahan sosial. Oleh karena itu kemiskinan selalu menjadi agenda pembangunan, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2009-2014.

Penghitungan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) modul konsumsi. Menurut BPS suatu rumah tangga dikatakan miskin jika nilai pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan (GK), dan dikatakan tidak miskin bila nilai pengeluaran per kapita sebulan berada di atas GK. Garis kemiskinan dinyatakan dalam nilai rupiah dan disusun berdasarkan nilai rupiah yang diperlukan untuk

¹ Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi-FEM IPB

memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Nilai garis kemiskinan antarnsiprovinci berbeda-beda, dan secara nasional sebesar Rp 200.262 per bulan pada tahun 2009.

Beberapa program sudah dijalankan oleh pemerintah bagi rumah tangga miskin yang diharapkan bisa mengurangi pengeluaran untuk komoditi/sektor tertentu, di samping mendukung program ekonomi hijau di Indonesia. Berkurangnya pengeluaran rumah tangga pada komoditi/sektor tertentu diharapkan bisa menambah konsumsi untuk komoditi/sektor lain sehingga mengubah pola konsumsi rumah tangga atau bahkan bisa disimpan untuk digunakan pada masa yang akan datang (ditabung). Rumah tangga miskin yang hanya memiliki pendapatan rendah, secara logika seharusnya menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang pokok dan penting saja, seperti makanan, kesehatan, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Kebutuhan yang tidak penting ini misalnya kebutuhan rokok dan tembakau. Rokok merupakan kebutuhan yang tidak penting karena rokok akan mengganggu kesehatan baik yang merokok maupun orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, bagi rumah tangga miskin yang memiliki kebiasaan merokok tidak akan diberi bantuan, seperti raskin, jamkesmas atau bantuan lain yang diperuntukan bagi rumah tangga miskin.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk meninjau seberapa besar pengeluaran rumah tangga miskin di Pulau Jawa yang dipergunakan untuk membeli rokok dan tembakau. Selain itu apakah pengeluaran untuk rokok tersebut memang ditentukan oleh faktor ekonomi dan demografi. Tujuan itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penyebab sulitnya implementasi ekonomi hijau (*green economic*) di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

1.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel 2008 dan 2009 yang merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Dari data Susenas Panel 2008 yang berjumlah 30.209 di Pulau Jawa terdapat 2.964 rumah tangga yang terdiri dari 1.940 rumah tangga miskin dan 1.024 rumah tangga sangat miskin.

1.3. Metode Analisis

Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran pola konsumsi rokok pada rumah tangga miskin yang dibedakan menjadi rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Selain itu juga akan dilihat menurut provinsi di Pulau Jawa tanpa dibedakan rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pola konsumsi akan dilihat dari pengeluaran rokok pada tahun 2008 dengan tahun 2009.

Polapengeluaran dalam penelitian ini dianalisis dengan membandingkan jumlah pengeluaran suatu komoditi/ sektor pada tahun 2008 dengan jumlah pengeluaran tahun 2009. RTM adalah rumah tangga yang pengeluaran per kapita di bawah GK dan di atas 0,8 x GK. RTSM adalah rumah tangga yang pengeluaran per kapita di bawah 0,8 x GK. Pola pengeluaran juga akan dibedakan menurut provinsi, tetapi tidak dibedakan menjadi RTM dan RTSM. Komoditi/ sektor yang dilihat adalah pendidikan, kesehatan, sembako, minyak tanah, gas (LPG), dan rokok.

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui fungsi konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Estimasi dilakukan dengan teknik kuadrat linier biasa (OLS). Model yang dianalisis adalah:

$$C_{rki} = \beta_0 + \beta_1 Yd_i + \beta_2 DWS_i + \beta_3 NRK_i + \varepsilon_i$$

dimana:

C_{rki} : Konsumsi rokok rumah tangga miskin sebulan (Rupiah)

Yd : Pendapatan rumah tangga miskin sebulan (Rupiah)

DWS : Jumlah anggota rumah tangga dewasa

NRK : Konsumsi non rokok rumah tangga miskin sebulan (Rupiah)

β_0 : Konstanta β_1, β_2 dan β_3 : Parameter

ε : *error-term*

i : rumah tangga ke 1,2,3,...n

2. Hasil Dan Pembahasan

2.1. Kemiskinan dan Konsumsi Rokok

Menurut BPS, pada bulan Maret tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia ada sekitar 34,96 juta orang (15,42%) dan jumlah ini turun menjadi 32,44 juta orang (14,15%) pada bulan Maret 2009. Dari jumlah tersebut ternyata separuh penduduk miskin berada di Pulau Jawa, yaitu 19,98 juta orang pada tahun 2008 dan turun menjadi 18,39 juta orang pada tahun 2009 atau turun dari 57,13 persen menjadi 56,70 persen.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan ini adalah kurangnya pendidikan. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase kepala rumah tangga miskin di Pulau Jawa yang tidak pernah sekolah atau sekolah tapi tidak lulus SD adalah 54,09 persen, bahkan apabila dilihat di pedesaan mencapai 58,22 persen, sedangkan dipertkotaan 46,86 persen. Selain dari kurangnya pendidikan, kemungkinan kemiskinan bisa disebabkan dari kepala rumah tangga yang berjenis kelamin wanita. Persentase rumah tangga miskin yang dikepalai oleh wanita sekitar 14,36 persen.

Tabel 1. Persentase pengeluaran yang dipergunakan untuk rokok menurut RTM dan RTSM di Pulau Jawa tahun 2008 dan 2009

| Wilayah | 2008 | 2009 |
|-----------------------------------|------|------|
| Rumah Tangga Miskin | | |
| - Jawa | 5,34 | 5,32 |
| - Perkotaan | 5,59 | 5,60 |
| - Pedesaan | 5,16 | 5,12 |
| Rumah Tangga Sangat Miskin | | |
| - Jawa | 4,31 | 4,17 |
| - Perkotaan | 3,95 | 4,49 |
| - Pedesaan | 4,57 | 3,92 |

Sumber: Susenas Panel 2008 dan 2009 diolah

Konsumsi rokok merupakan konsumsi yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan dan bahkan akan merusak kesehatan. Pengeluaran rokok pada rumah tangga miskin ternyata sangat tinggi. Hal ini menjadikan inspirasi bagi pemerintah DKI Jakarta untuk tidak memberikan bantuan

berupa raskin, jamkesmas atau bantuan yang lainnya kepada rumah tangga miskin. Pada tahun 2009, ada 67,30 persen rumah tangga miskin yang minimal ada salah satu anggota rumah tangganya merokok. Rata-rata rumah tangga miskin perokok ini setiap bulannya menghabiskan sekitar Rp 53.585 atau sekitar 7,38 persen dari total pengeluaran rumah tangga, bahkan di Banten pengeluaran rumah tangga miskin perokok akan menghabiskan sebesar Rp 104.796/bulan atau sekitar 12,17 persen dari total pengeluaran. Besarnya konsumsi rokok dan tembakau di Banten ini bila kita hubungkan dengan pemberian BLT, maka uang BLT yang sebesar Rp 100.000/bulan seluruhnya dipergunakan untuk konsumsi rokok dan tembakau, bahkan untuk memenuhi konsumsi rokok rumah tangga miskin tersebut masih harus mengambil porsi yang akan dipergunakan untuk konsumsi lain.

Jumlah maupun persentase pengeluaran yang digunakan untuk merokok pada RTM lebih tinggi dari pada RTSM. Pada RTM persentase pengeluaran yang dipergunakan untuk rokok lebih dari 5 persen, sedangkan pada RTSM kurang dari 5 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada rumah tangga miskin semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi pula konsumsi untuk merokok. Pengeluaran untuk rokok ini melebihi pengeluaran untuk pendidikan ataupun kesehatan. Pada tahun 2008 dan 2009 persentase pengeluaran untuk rokok pada rumah tangga di Indonesia rata-rata sekitar 5 persen dari total pengeluaran. Tabel 2 memperlihatkan persentase pengeluaran rokok dan tembakau menurut RTM dan RTSM di Pulau Jawa.

Tabel 2. Persentase pengeluaran yang dipergunakan untuk rokok pada RTM dan RTSM menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2008 dan 2009

| Provinsi | 2008 | 2009 |
|---------------|------|------|
| DKI Jakarta | 4,83 | 4,66 |
| Jawa Barat | 5,66 | 5,95 |
| Jawa Tengah | 5,04 | 4,04 |
| DI Yogyakarta | 2,91 | 2,82 |
| Jawa Timur | 5,64 | 4,97 |
| Banten | 6,57 | 9,96 |
| Jawa | 5,03 | 5,00 |
| Perkotaan | 5,09 | 5,28 |
| Pedesaan | 4,99 | 4,79 |

Sumber: Susenas Panel 2008 dan 2009 diolah

Menurut hasil dari Susenas panel 2009 pengeluaran konsumsi untuk rokok dan tembakau memang cukup besar pada rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin. Rata-rata konsumsi rokok di Pulau Jawa adalah Rp 36.065/bulan atau sekitar 5,00 persen dari pengeluaran. Provinsi Banten merupakan provinsi yang kenaikan persentase pengeluaran rokok paling tinggi yaitu pada tahun 2008 hanya 6,57 persen, tetapi pada tahun 2009 melonjak hingga 9,96 persen. Rata-rata pengeluaran untuk rokok dan tembakau di Banten pada tahun 2009 adalah paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar Rp 84.835/bulan.

2.2. Estimasi Model Konsumsi Rokok

Menurut Barber (2008), ada 2 asumsi untuk memutuskan mengkonsumsi sesuatu. Asumsi pertama, berdasarkan pengetahuan yang penuh atas biaya dan manfaat. Asumsi kedua, akan menanggung sendiri risiko atas keputusan berkonsumsi. Seseorang yang mengkonsumsi rokok akan melanggar kedua asumsi tersebut. Seseorang yang mengkonsumsi rokok walaupun sudah mengetahui bahaya merokok, tetapi tidak mengurangi merokok bahkan akan menaikkan merokok bila terjadi kenaikan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari estimasi konsumsi rokok pada rumah tangga miskin.

Nilai *Adjusted R²* di Pulau Jawa adalah sebesar 0,797. Nilai *Adjusted R²* tersebut mengartikan bahwa model masih cukup baik yang artinya konsumsi rokok dapat dijelaskan dengan cukup baik oleh variabel bebas sebesar 79,7 persen. Variabel bebas secara bersama-sama di uji dengan Uji F dan mendapatkan nilai sebesar 3.559 dengan nilai *P-value* 0,000. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model sangat signifikan secara bersama-sama memengaruhi tingkat konsumsi rokok. Masing-masing variabel kemudian di uji dengan Uji t (dengan tingkat kepercayaan 99%). Dari hasil pengolahan didapatkan bahwa ketiga variabel tersebut yaitu pendapatan, anggota rumah tangga dewasa dan konsumsi non rokok memengaruhi tingkat konsumsi rokok di Pulau Jawa.

Keinginan konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Pulau Jawa sangat tinggi. Nilai koefisien pendapatan sebesar 0,678 atau nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 14,12. Nilai elastisitas ini mengartikan bahwa bila ada kenaikan pendapatan 1 persen maka konsumsi

rokok akan naik sebesar 14,12 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Konsumsi rokok minimal di Pulau Jawa ketika rumah tangga miskin tidak memiliki pendapatan sebesar Rp 12.707, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Tabel 3. Nilai estimasi parameter model regresi konsumsi rokok dan elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok menurut provinsi di Pulau Jawa

| Provinsi | β_0 | Pendapatan | Art-dewasa | Non rokok | Elastisitas pendapatan |
|---------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------------------|
| DKI Jakarta | 46.773* | 0,650* | 4.362 ^{ns} | -0,704* | 14,52 |
| Jawa Barat | 13.041* | 0,643* | 5.616* | -0,691* | 11,27 |
| Jawa Tengah | 15.115* | 0,616* | 5.952* | -0,678* | 15,92 |
| DI Yogyakarta | 9.643* | 0,679* | 716 ^{ns} | -0,707* | 24,73 |
| Jawa Timur | 12.794* | 0,721* | 2.382* | -0,766* | 15,07 |
| Banten | 26.413* | 0,784* | 6.474* | -0,863* | 8,24 |
| Total Jawa | 12.707* | 0,678* | 3.057* | -0,722* | 14,12 |
| Perkotaan | 12.912* | 0,626* | 2.985* | -0,666* | 12,47 |
| Pedesaan | 12.358* | 0,798* | 2.270* | -0,798* | 17,24 |

Adj-R² = 0,713 - 0,864

Ket: *) signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen

^{ns}) Tidak nyata

Anggota rumah tangga dewasa pada rumah tangga sangat memengaruhi konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Setiap ada penambahan satu anggota rumah tangga dewasa maka konsumsi rokok akan naik sebesar Rp 3.057, dengan asumsi pendapatan konstan. Hal ini wajar sebab, anggota rumah tangga yang merokok rata-rata adalah anggota rumah tangga yang sudah dewasa. Menurut Barber (2008), rata-rata umur pertama kali merokok pada tahun 2004 adalah pada saat umur 17,4 tahun.

Konsumsi non rokok juga sangat signifikan dalam memengaruhi konsumsi rokok. Hubungan konsumsi rokok dan konsumsi non rokok sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien konsumsi non rokok sebesar 0,722. Apabila konsumsi non rokok naik sebesar Rp 1.000, maka konsumsi rokok akan turun sebesar Rp 722, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok dan variabel yang memengaruhi konsumsi rokok dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel-variabel yang mempengaruhi konsumsi rokok di perkotaan di Pulau Jawa dapat dijelaskan dengan nilai *Adjusted R*² = 0,764. Nilai *Adjusted R*² tersebut mengartikan bahwa model masih cukup baik, yang artinya konsumsi rokok dapat dijelaskan dengan cukup baik oleh variabel bebas sebesar 76,4 persen. Variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan Uji F dan mendapatkan nilai sebesar 1.069 dengan nilai *P-value* 0,000. Konsumsi rokok minimal di perkotaan hampir sama dengan di Pulau Jawa, adalah sebesar Rp 12.912.

Nilai elastisitas pendapatan untuk rokok di perkotaan lebih rendah dari pada di Pulau Jawa. Hal ini bisa disebabkan karena di perkotaan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya merokok lebih tinggi dari pada di pedesaan. Pengetahuan bahaya merokok di perkotaan lebih tinggi dikarenakan akses informasi lebih mudah didapat daripada di pedesaan. Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 12,47. Nilai elastisitas yang rendah ini didukung juga dengan setiap ada anggota rumah tangga dewasa maka konsumsi rokok hanya naik sebesar Rp 2.985, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Selain itu juga diperkuat dengan nilai koefisien dari konsumsi non rokok yang juga lebih rendah dari Pulau Jawa. Rumah tangga miskin yang akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000, maka akan menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 666, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Model fungsi konsumsi rokok di pedesaan cukup baik dengan melihat oleh nilai *Adjusted R*² sebesar 0,864. Nilai *Adjusted R*² tersebut mengartikan bahwa fungsi konsumsi rokok di pedesaan dapat dijelaskan dengan variabel bebas sebesar 86,4 persen. Uji F memiliki nilai sebesar 3.655,328 dengan nilai *P-value* 0,000. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama sangat signifikan memengaruhi tingkat konsumsi rokok. Setiap variabel kemudian di uji dengan Uji t (dengan tingkat kepercayaan 99%). Dari hasil pengolahan didapatkan bahwa ketiga variabel tersebut yaitu pendapatan, anggota rumah tangga dewasa dan konsumsi non rokok memengaruhi konsumsi rokok di pedesaan.

Konsumsi rokok minimal di pedesaan adalah sebesar Rp 12.359. Nilai koefisien pendapatan atau nilai elastisitas pendapatan untuk rokok di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan dan rata-rata di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena di pedesaan lebih banyak waktu luang

sehingga mereka mencari kesibukan misalnya dengan merokok. Selain itu informasi pengetahuan bahaya merokok di pedesaan lebih rendah karena akses informasi tidak mudah di perkotaan dan juga rata-rata tingkat pendidikan di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Nilai elastisitas pendapatan untuk rokok di pedesaan sebesar 17,24. Hubungan konsumsi non rokok dengan konsumsi rokok sangat tinggi. Rumah tangga miskin di pedesaan apabila akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000, maka akan menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 847, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Konsumsi rokok di DKI Jakarta sangat tinggi. Tingginya konsumsi ini bisa dilihat dari konsumsi otonomus rokok yang sangat tinggi yaitu Rp 46.773. Konsumsi otonomus rokok di DKI paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pendapatan dan konsumsi non rokok sangat signifikan memengaruhi konsumsi rokok di DKI Jakarta, sedangkan anggota rumah tangga dewasa tidak signifikan memengaruhi konsumsi rokok. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,762. Nilai *Adjusted R²* ini mengartikan bahwa model tersebut bisa dipercaya hingga 76,2 persen. Sisanya yaitu sekitar 23,8 persen adalah dipengaruhi variabel bebas yang belum tercakup dalam penelitian.

Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 14,52, yang artinya setiap ada kenaikan pendapatan sebesar 1 persen, maka konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di DKI Jakarta akan naik sebesar 14,52 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hubungan konsumsi rokok dan non rokok di DKI Jakarta juga cukup tinggi, dengan melihat koefisien konsumsi non makanan sebesar 0,704. Rumah tangga miskin di DKI Jakarta, apabila akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000 maka harus menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 704, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Di Jawa Barat konsumsi rokok tidak setinggi di DKI Jakarta. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai koefisien atau nilai elastisitas pendapatan dan koefisien konsumsi non rokok lebih rendah dari DKI Jakarta. Semua variabel bebas yaitu pendapatan, anggota rumah tangga dewasa dan konsumsi non rokok sangat signifikan memengaruhi konsumsi rokok. Tingkat signifikan tersebut sebesar 99 persen.

Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 11,27, yang artinya setiap ada kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka konsumsi rokok akan naik sebesar 11,27 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Penambahan konsumsi rokok yang disebabkan penambahan satu anggota rumah tangga dewasa di Jawa Barat sangat tinggi bila dibandingkan dengan di Pulau Jawa baik perkotaan maupun pedesaan. Tingginya konsumsi yang disebabkan oleh penambahan anggota rumah tangga dewasa, kemungkinan disebabkan karena budaya merokok serta biasanya pada daerah dataran tinggi yang memiliki cuaca dingin, mereka akan mencari sesuatu yang bisa menghangatkan badan.

Hubungan konsumsi rokok dan non rokok di Jawa Barat juga cukup tinggi, dengan melihat koefisien konsumsi non makanan sebesar 0,691. Rumah tangga miskin di Jawa Barat, apabila akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000 maka harus menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 691, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Fungsi konsumsi rokok di Jawa Tengah dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah anggota rumah tangga dewasa dan konsumsi non rokok. Nilai *Adjusted R²* masih cukup tinggi yaitu 0,717, ini mengartikan bahwa model tersebut bisa dipercaya hingga 71,7 persen, sedangkan yang 28,3 persennya bisa diterangkan dengan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model ini.

Seperti di Jawa Barat konsumsi rokok di Jawa Tengah juga cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari Jawa Barat. Konsumsi otonomus rokok juga lebih tinggi dari Jawa Barat yaitu sebesar Rp 15.115. Konsumsi rokok di Jawa Tengah yang tinggi ini bisa disebabkan karena selain dari budaya merokok juga karena pabrik rokok banyak yang berada di Jawa Tengah ataupun tanaman tembakau banyak di tanam di Jawa Tengah.

Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 15,92, yang artinya setiap ada kenaikan pendapatan sebesar 1 persen maka konsumsi rokok akan naik sebesar 15,92 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Anggota rumah tangga dewasa di Jawa Tengah sangat tinggi dalam meningkatkan konsumsi rokok. Setiap ada penambahan 1 anggota rumah tangga dewasa maka akan meningkatkan pengeluaran untuk rokok sebesar Rp 5.952, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hubungan antara konsumsi rokok dan non rokok tidak sekuat di provinsi lain, yaitu

dengan melihat nilai koefisien konsumsi non rokok hanya -0,678. Rumah tangga miskin di Jawa Tengah bila akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000 maka harus menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 678, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Sama seperti fungsi konsumsi total maupun fungsi konsumsi sembako, jumlah anggota rumah tangga tidak memengaruhi konsumsi rokok di DI Yogyakarta. Fungsi konsumsi rokok di DI Yogyakarta hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan konsumsi non rokok. Nilai *Adjusted R²* masih cukup tinggi yaitu 0,737, ini mengartikan bahwa model tersebut bisa dipercaya hingga 73,7 persen, dan 26,3 persennya bisa diterangkan dengan variabel yang belum dimasukkan dalam model ini. Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok di DI Yogyakarta paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini dapat didukung dari hasil perhitungan untuk melihat hukum Engel tentang konsumsi makanan di DI Yogyakarta. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa konsumsi makanan akan terus naik ketika pendapatan naik dan konsumsi makanan akan turun ketika pendapatan sudah mencapai Rp 987.069. Sedangkan untuk provinsi lainnya tidak diperlukan pendapatan setinggi seperti di DI Yogyakarta. Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok di DI Yogyakarta sebesar 24,73, hal ini mengartikan bahwa keinginan untuk mengonsumsi rokok sangat tinggi.

Konsumsi otonomus rokok di Jawa Timur hampir sama dengan konsumsi otonomus rokok di Pulau Jawa pada umumnya, yaitu sebesar Rp 12.794. penambahan anggota rumah tangga dewasa akan menambah konsumsi rokok sebesar Rp 2.382, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok sebesar 15,07. Hal ini mengartikan bahwa keinginan untuk mengonsumsi di Jawa Timur masih cukup tinggi. Apabila pendapatan naik sebesar 1 persen maka konsumsi rokok akan naik sebesar 15,07 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Keinginan rumah tangga miskin untuk merokok di Banten paling rendah di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Keinginan yang paling rendah ini terlihat dari nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Banten yang hanya sebesar 8,24. Hal ini bisa disebabkan karena konsumsi rokok di Banten sudah cukup tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, dengan melihat persentase

pengeluaran untuk rokok di Banten sebesar 9,96 persen. Nilai elastisitas dapat diartikan setiap pendapatan naik sebesar 1 persen maka konsumsi rokok akan naik sebesar 8,24 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Setiap ada penambahan satu anggota rumah tangga dewasa maka konsumsi rokok akan naik sebesar Rp 6.474, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hubungan konsumsi rokok dan konsumsi non rokok juga sangat tinggi. Rumah tangga miskin di Banten apabila akan menaikkan konsumsi non rokok sebesar Rp 1.000 maka akan menurunkan konsumsi rokok sebesar Rp 863, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kemiskinan dan konsumsi rokok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya diterapkan berbagai program yang mendukung ekonomi hijau (*green economic*) di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena 67 persen rumah tangga miskin adalah merupakan rumah tangga perokok. Rata-rata pengeluaran rumah tangga perokok yang dipergunakan untuk rokok adalah sebesar 7,38 persen atau sebesar Rp 53.858. Di Provinsi Banten pengeluaran rumah tangga perokok bahkan bisa mencapai 12,17 persen atau sebesar Rp 104.796 per bulan.

Dari respon terhadap pendapatan, konsumsi rokok di Pulau Jawa dikatakan elastis. Nilai elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok antar provinsi berbeda. Provinsi yang memiliki elastisitas pendapatan untuk konsumsi rokok terendah adalah Banten (8,24) dan yang terbesar adalah DI Yogyakarta (24,73).

Rujukan

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007. *Analisis Konsumsi Rumah Tangga*. BPS. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. BPS. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Indonesia 2009*. BPS. Jakarta
- Engel JF, Blackwell RD, Miniard PW .1994. *Perilaku Konsumen*. Binarupa Aksara. Jakarta.

- Ilham N. 2009. *Dinamika Kesejahteraan Petani dan Non Petani di Indoneisa: Suatu Analisis Makro vs Mikro*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Javed MS, Hussan S, Salik KM. 2005. Marginal Propensity to Consume: an Application to small Farmer of Punjab, period 1980-1981 to 1991-1992. *Journal of Agriculture & Social Sciences*, Volume 1 No 3:231-234
- Mankiw NG. 2007. *Makroekonomi*. Erlangga
- Rochaeni S, Lokollo EM. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah tangga Petani di Kelurahan Setugede Kota Bogor. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 23 No 2 Oktober 2005 hal 133 - 158
- Saliem, Purwati H. 2002. Analisis Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* Vol 20, No.2 hal 64-91. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian.
- Samuel PA, Nordhous WD. 1986. *Ekonomi*. Edisi Keduabelas, Jilid I, Diterjemahkan oleh A. Jaka Wasana. Erlangga.
- Suparmoko M. 1991. *Pengantar Ekonomi Makro*. BPFE. Yogyakarta.
- Susilowati SH. 2001. *Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. 2001. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian Bogor.
- Todaro MP, SC Smith, 2002. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi kesembilan, Jilid I. Erlangga